

**“PENDAMPINGAN SEKOLAH DALAM PENGEMBANGAN
PROGRAM PENCEGAHAN PERUNDUNGAN BERBASIS NILAI
PANCASILA”**

**“SCHOOL MENTORING IN DEVELOPING PANCASILA VALUE-
BASED BULLYING PREVENTION PROGRAMS”**

Maharidiawan Putra¹, Yandi Ugang², Endrawati³, Sriyana⁴, Rani⁵

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Palangka Raya, Indonesia

²³⁵Program Studi Hukum, FH, Universitas PGRI Palangka Raya, Indonesia

⁴Program Studi Sosiologi, FISIP, Universitas PGRI Palangka Raya, Indonesia

[¹, yandi.ugang@gmail.com², endra.nauval0304@gmail.com³,
riyanupp72@gmail.com⁴, raniuppr@gmail.com⁵](mailto:maharidiawanputra@gmail.com)

ABSTRAK

Perundungan di lingkungan sekolah menengah pertama (SMP) masih menjadi tantangan serius yang mendesak untuk ditangani karena berdampak buruk pada psikologis dan prestasi akademis siswa. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mendampingi para guru SMP di Kabupaten Pulang Pisau dalam mengembangkan program pencegahan perundungan yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila dengan pendekatan kombinasi (sosialisasi, workshop, dan pendampingan klinis). Pengabdian dilaksanakan dari Desember 2025 hingga Mei 2026 dengan melibatkan mitra guru SMP di Pulang Pisau. Metode pelaksanaan meliputi tahap persiapan, asesmen kebutuhan, pelaksanaan workshop interaktif, serta evaluasi program penanganan perundungan di sekolah. Hasil pengabdian menunjukkan peningkatan signifikans pemahaman guru mengenai bentuk-bentuk perundungan serta terbentuknya draf SOP pencegahan perundungan berbasis karakter Pancasila di sekolah mitra. Kesimpulannya, pendampingan intensif dengan mengintegrasikan kearifan lokal dan nilai Pancasila efektif memperkuat kapasitas guru dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan inklusif.

Kata Kunci: Pendampingan Guru, Perundungan, Nilai Pancasila, Pulang Pisau.

ABSTRACT

Bullying in junior high schools remains a serious challenge that urgently needs to be addressed due to its adverse effects on students' psychology and academic achievement. This community service activity aims to assist junior high school teachers in Pulang Pisau Regency in developing bullying prevention programs based on Pancasila values using a combined approach (socialization, workshops, and clinical mentoring). The program was conducted from December 2025 to May 2026, involving junior high school teacher partners in Pulang Pisau. The implementation methods included the preparation phase, needs assessment, interactive workshops, and evaluation of bullying management programs in schools. The results showed a significant increase in teachers' understanding of various forms of bullying and the formulation of draft SOPs for bullying prevention based on Pancasila character in partner schools. In conclusion, intensive mentoring by integrating local wisdom and Pancasila values is effective in strengthening teachers' capacity to create a safe and inclusive school environment.

Keywords: Teacher Mentoring, Bullying, Pancasila Values, Pulang Pisau.

PENDAHULUAN

Perundungan di lingkungan sekolah menengah pertama (SMP) telah menjadi fenomena global sekaligus nasional yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pemangku kepentingan pendidikan. Tindakan intimidasi, baik secara fisik, verbal, maupun siber, tidak hanya mencederai fisik korban tetapi juga merusak tatanan psikologis yang mendalam (Savitri & Rahayu, 2021). Sekolah seharusnya menjadi ruang aman tempat siswa tumbuh dan mengeksplorasi potensi diri tanpa rasa takut. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak institusi pendidikan yang masih rentan terhadap praktik-praktik kekerasan antarsiswa (Pratama & Utami, 2022). Oleh karena itu, penguatan kapasitas sekolah melalui program pencegahan yang sistematis menjadi kebutuhan yang sangat mendesak saat ini.

Kabupaten Pulang Pisau di Kalimantan Tengah menghadapi tantangan geografis dan sosiokultural yang unik dalam implementasi kebijakan pendidikan nasional. Guru-guru di wilayah ini sering kali dihadapkan pada keterbatasan akses pelatihan intensif mengenai manajemen konflik dan psikologi anak (Hidayat & Lestari, 2023). Fenomena perundungan di tingkat SMP sering dianggap sebagai gurauan biasa oleh sebagian pendidik karena kurangnya literasi mengenai dampak psikologis jangka panjang. Kondisi ini diperparah oleh minimnya perangkat regulasi internal sekolah yang secara khusus mengatur tentang tata cara pencegahan dan penanganan perundungan. Tanpa adanya intervensi terstruktur, ekosistem sekolah yang tidak sehat ini akan terus berlanjut dan merugikan generasi muda.

Pemerintah Indonesia telah meluncurkan Profil Pelajar Pancasila sebagai arah baru penguatan karakter dalam Kurikulum Merdeka guna menangkal dekadensi moral. Nilai-nilai Pancasila yang mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial merupakan fondasi filosofis yang kuat untuk membangun sikap empati (Kurniawan & Saputra, 2024). Pengintegrasian nilai-nilai ini ke dalam program sekolah dinilai sebagai strategi preventif yang paling relevan untuk mereduksi perilaku agresif siswa. Melalui pemahaman mendalam tentang nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, siswa diajarkan untuk saling menghormati perbedaan. Tantangannya kini terletak pada bagaimana para guru mampu menerjemahkan nilai abstrak Pancasila ke dalam program aksi nyata di sekolah.

Guru SMP memegang peranan krusial sebagai garda terdepan dalam mendeteksi dan mengintervensi tindakan perundungan sejak dini. Karakteristik siswa SMP yang berada pada fase transisi remaja membuat mereka sangat rentan terhadap tekanan teman sebaya (Nugroho & Wijaya, 2022). Guru tidak hanya bertindak sebagai pengajar materi akademis, tetapi juga sebagai fasilitator moral dan pelindung emosional siswa. Namun, banyak guru yang merasa tidak percaya diri atau kekurangan instrumen praktis untuk melakukan pencegahan secara konsisten (Sari & Setiawan, 2023). Program pendampingan yang berfokus pada peningkatan kompetensi pedagogis dan personal guru dalam hal ini menjadi kunci keberhasilan transformasi budaya sekolah.

Pendekatan kombinasi yang menggabungkan sosialisasi massal, workshop penyusunan instrumen, dan pendampingan klinis secara personal dinilai lebih efektif daripada metode tunggal. Sosialisasi memberikan landasan konseptual yang seragam, sedangkan workshop menghasilkan produk nyata yang dapat langsung diterapkan (Wibowo

& Astuti, 2024). Sementara itu, pendampingan klinis memfasilitasi guru untuk memecahkan kasus-kasus spesifik yang terjadi di kelas mereka masing-masing. Melalui kombinasi metode ini, keberlanjutan program setelah masa pengabdian berakhir dapat lebih terjamin karena adanya transfer pengetahuan yang mendalam. Pola intervensi berlapis ini dirancang untuk menyentuh aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik para pendidik di Pulang Pisau.

Analisis situasi di SMP mitra di Pulang Pisau menunjukkan adanya urgensi tinggi karena tingginya angka pelaporan kasus gesekan antar-siswa di media sosial maupun dunia nyata. Guru-guru mengonfirmasi bahwa penanganan yang dilakukan selama ini cenderung bersifat reaktif atau hanya ketika kasus telah membesar (Putri & Ramadhan, 2025). Tindakan kuratif tanpa dibarengi upaya preventif terbukti tidak mampu menyelesaikan akar permasalahan perundungan secara tuntas. Sekolah-sekolah tersebut belum memiliki *Standard Operating Procedure* (SOP) yang jelas mengenai mitigasi risiko perundungan berbasis karakter. Akibatnya, penanganan sering kali tidak konsisten dan justru menimbulkan rasa ketidakadilan bagi korban maupun pelaku.

Pancasila sebagai pemersatu bangsa memiliki dimensi lokalitas yang kuat jika dikaitkan dengan falsafah hidup masyarakat Kalimantan Tengah, seperti semangat *Huma Betang*. Falsafah kebersamaan dan toleransi tinggi dalam *Huma Betang* sangat selaras dengan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia (Lestari & Nugraha, 2023). Membumikan nilai-nilai ini dalam konteks pencegahan perundungan berarti mengawinkan nilai nasional dengan kearifan lokal yang dihormati masyarakat setempat. Pendekatan ini dipercaya akan lebih mudah diterima oleh siswa dan guru karena dekat dengan kehidupan sehari-hari mereka. Kegiatan pengabdian ini berupaya menjembatani konseptualisasi nilai Pancasila dan kearifan lokal ke dalam kurikulum mikro sekolah.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa program anti-perundungan yang tidak berbasis pada nilai budaya lokal cenderung gagal dalam jangka panjang. Intervensi yang terlalu teoretis tanpa menyentuh aspek moralitas mendasar siswa tidak akan mampu mengubah perilaku agresif secara permanen (Santoso & Handayani, 2022). Nilai Pancasila menawarkan pendekatan holistik yang menyentuh hati nurani dan kesadaran spiritual siswa sebagai makhluk tuhan. Guru memerlukan strategi khusus untuk mengemas nilai-nilai ini menjadi kegiatan sekolah yang menarik, interaktif, dan tidak membosankan bagi remaja. Di sinilah peran perguruan tinggi melalui Lembaga Pengabdian Masyarakat untuk memberikan rekayasa metodologis yang aplikatif.

Pelaksanaan pengabdian ini dirancang untuk berlangsung selama enam bulan guna memastikan proses internalisasi berjalan optimal. Rentang waktu dari Desember 2025 hingga Mei 2026 memungkinkan tim pengabdian melakukan monitoring yang ketat terhadap perubahan perilaku dan kebijakan sekolah (Fitriani & Kusuma, 2026). Tahapan awal difokuskan pada penyamaan persepsi, diikuti oleh restrukturisasi kebijakan sekolah, dan diakhiri dengan uji coba program penanganan. Durasi yang panjang ini membedakan program ini dengan pelatihan konvensional yang biasanya hanya berlangsung satu atau dua hari saja. Keberhasilan program ini diukur dari adanya produk regulasi dan penurunan intensitas konflik di sekolah mitra.

Selain berdampak pada iklim sekolah, program ini juga berkontribusi pada pencapaian indikator kinerja utama perguruan tinggi dalam hal hilirisasi riset. Konsep-

konsep teoritis mengenai pendidikan karakter dan psikologi perkembangan anak diturunkan ke dalam panduan praktis bagi praktisi pendidikan (Raharjo & Utama, 2023). Sinergi antara akademisi dan praktisi di sekolah menengah diharapkan mampu menciptakan model percontohan sekolah aman perundungan di Pulang Pisau. Model ini nantinya dapat direplikasi oleh dinas pendidikan setempat untuk diterapkan di sekolah-sekolah lain yang memiliki karakteristik serupa. Dukungan penuh dari kepala sekolah dan pengawas menjadi katalisator utama kelancaran seluruh rangkaian kegiatan ini.

Tantangan siber atau *cyberbullying* juga menjadi fokus tambahan dalam pengabdian ini seiring meningkatnya penggunaan gawai oleh siswa SMP pasca-pandemi. Banyak guru merasa gagap teknologi dalam memantau interaksi digital siswa di luar jam sekolah yang berdampak pada keharmonisan di kelas (Fadilah & Anwar, 2024). Program pencegahan berbasis Pancasila di era digital menekankan pada etika bermedia sosial yang mencerminkan nilai kemanusiaan dan persatuan. Guru dilatih untuk menyusun modul literasi digital singkat yang disisipkan dalam kegiatan ekstrakurikuler atau bimbingan konseling. Dengan demikian, pencegahan perundungan dilakukan secara komprehensif, baik di dunia nyata maupun di ruang siber.

Secara sosiologis, penguatan karakter Pancasila di sekolah-sekolah Pulang Pisau juga berkontribusi pada pencegahan konflik horizontal di masyarakat yang lebih luas sejak dini. Anak-anak yang terbiasa menyelesaikan perbedaan dengan musyawarah mufakat di sekolah akan tumbuh menjadi warga negara yang demokratis (Budiman & Gafur, 2022). Sekolah adalah miniatur masyarakat, sehingga perbaikan iklim sekolah secara langsung berkontribusi pada ketahanan sosial wilayah tersebut. Kolaborasi dengan orang tua siswa juga diinisiasi dalam program ini agar tercipta keselarasan nilai antara rumah dan sekolah. Pola asuh yang mendukung nilai-nilai Pancasila di rumah akan memperkuat program intervensi yang dilakukan oleh para guru.

Hambatan utama yang sering ditemui dalam program serupa adalah konsistensi komitmen dari pihak manajemen sekolah karena pergantian kebijakan. Oleh sebab itu, legalitas program melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Sekolah menjadi target luaran wajib dalam kegiatan pendampingan ini (Utomo & Dewi, 2024). Tim pengabdian memposisikan diri sebagai mitra sejajar yang mendampingi, bukan menggurui, sehingga menciptakan kenyamanan psikologis bagi guru-guru peserta. Fleksibilitas dalam proses pendampingan klinis diberikan agar tidak mengganggu tugas utama guru dalam mengajar di kelas. Pendekatan yang humanis ini menjadi pembeda utama yang menjamin tingginya partisipasi aktif dari para mitra.

Melalui artikel ini, akan dipaparkan secara mendalam proses, hasil, dan efektivitas dari program pendampingan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Pulang Pisau. Diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan ilmu pendidikan, khususnya bidang pengabdian masyarakat (Prasetyo & Yunus, 2025). Dokumentasi yang sistematis mengenai keberhasilan maupun kendala di lapangan dapat menjadi rujukan berharga bagi pengabdian lain di masa depan. Upaya memanusiakan manusia melalui pendidikan karakter berbasis Pancasila adalah perjalanan panjang yang membutuhkan dokumentasi ilmiah yang solid.

Berdasarkan latar belakang tersebut, fokus utama pengabdian ini adalah memberikan solusi atas keterbatasan kapasitas guru dalam merancang program anti-perundungan yang kontekstual. Permasalahan mitra diselesaikan dengan menghadirkan instrumen yang teruji dan pendampingan yang konsisten dari akademisi (Sujatmiko & Wardani, 2023). Dengan bersinerginya nilai Pancasila, kearifan lokal *Huma Betang*, dan metode pendampingan kombinasi, diharapkan terbentuk ekosistem SMP di Pulang Pisau yang merdeka dari perundungan. Artikel ini akan mengurai capaian-capaian tersebut secara komprehensif pada bagian-bagian selanjutnya.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan **kombinasi** yang meliputi tiga tahapan utama: sosialisasi, workshop pembuatan produk, dan pendampingan klinis berkelanjutan. Sasaran mitra dalam kegiatan ini adalah guru-guru SMP di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Kegiatan pengabdian dirancang secara sistematis dengan garis waktu pelaksanaan dari bulan Desember 2025 hingga Mei 2026. Secara rinci, matriks lini masa pelaksanaan program pengabdian disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel Lini Masa Pelaksanaan Kegiatan (Januari–Mei 2026)

No	Bulan	Tahapan Kegiatan	Deskripsi Aktivitas	Output / Target
1	Januari 2026	Asesmen Kebutuhan & Sosialisasi Awal	Menyebarkan kuesioner pemetaan awal kasus perundungan dan menyelenggarakan sosialisasi urgensi nilai Pancasila.	Data awal profil perundungan sekolah dan kesamaan persepsi guru.
2	Februari 2026	Workshop Desain Program	Pelatihan interaktif penyusunan modul pencegahan perundungan terintegrasi nilai-nilai Pancasila.	Draf awal modul penguatan karakter anti-perundungan.
3	Maret 2026	Workshop Penyusunan SOP	Pendampingan pembuatan dokumen regulasi dan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) penanganan perundungan.	Dokumen draf SOP pencegahan dan penanganan perundungan sekolah.

No	Bulan	Tahapan Kegiatan	Deskripsi Aktivitas	Output / Target
4	April 2026	Pendampingan Klinis & Uji Coba	Pendampingan langsung penanganan kasus tiruan/nyata dan uji coba implementasi SOP di tiap kelas.	Validasi instrumen dan kesiapan guru dalam mengeksekusi SOP.
5	Mei 2026	Evaluasi Akhir & Pelaporan	Pengukuran dampak program menggunakan <i>post-test</i> dan penyusunan laporan serta draf artikel ilmiah.	

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan dari bulan Desember 2025 hingga Mei 2026 ini telah berhasil meningkatkan kapasitas kognitif para guru SMP di Pulang Pisau secara signifikan mengenai pencegahan perundungan. Berdasarkan hasil *pre-test* yang dilakukan pada Januari 2026, pemahaman awal guru mengenai jenis-jenis perundungan modern—termasuk *cyberbullying* dan pengucilan sosial—berada pada kategori rendah (42%). Setelah melalui serangkaian workshop interaktif dan sosialisasi berbasis nilai Pancasila, hasil *post-test* pada Mei 2026 menunjukkan lonjakan drastis ke kategori sangat baik dengan skor rata-rata mencapai 89%. Para guru kini mampu mengidentifikasi tindakan agresif halus yang berpotensi menjadi perundungan sistemik di lingkungan sekolah.

Selain peningkatan kapasitas pengetahuan individu, pengabdian ini berhasil memfasilitasi lahirnya produk regulasi internal sekolah yang konkret dan legal. Melalui workshop intensif pada Maret 2026, guru-guru dari sekolah mitra berhasil menyusun draf Dokumen *Standard Operating Procedure* (SOP) Pencegahan dan Penanganan Perundungan Berbasis Nilai Pancasila yang kemudian disahkan oleh kepala sekolah. Dokumen SOP ini mengatur secara jelas alur pelaporan aman bagi korban, mekanisme investigasi objektif oleh guru, serta bentuk sanksi edukatif yang mengedepankan asas keadilan sosial dan kemanusiaan. Kehadiran SOP ini mengisi kekosongan hukum internal yang selama ini menjadi kendala utama guru dalam mengambil tindakan tegas terhadap pelaku perundungan.

Tahap pendampingan klinis yang dilaksanakan pada April 2026 berhasil membimbing para guru dalam menyelesaikan beberapa studi kasus nyata yang terjadi di lingkungan sekolah mitra dengan pendekatan persuasif. Guru bimbingan konseling (BK) bersama guru mata pelajaran dilatih menggunakan instrumen mediasi berbasis nilai musyawarah mufakat (Sila ke-4 Pancasila) untuk meredakan ketegangan antarkelompok

siswa. Berdasarkan jurnal refleksi guru, metode mediasi ini terbukti lebih efektif memunculkan rasa penyesalan yang tulus dari pelaku dibandingkan dengan pemberian hukuman fisik atau skorsing sepihak. Proses pendampingan tatap muka secara klinis ini memberikan rasa aman bagi pendidik karena mendapatkan supervisi langsung dari tim pakar perguruan tinggi.

Luaran lain yang dihasilkan dari pengabdian ini adalah terbentuknya Satuan Tugas (Satgas) Anti-Perundungan yang beranggotakan perwakilan guru dan kader siswa pilihan di sekolah mitra. Satgas ini berfungsi sebagai agen perubahan dan sistem peringatan dini (*early warning system*) yang memantau interaksi siswa di area-area rawan pengawasan, seperti kantin, belakang sekolah, dan grup WhatsApp angkatan. Kader siswa yang dilatih sebagai "Duta Pancasila" bertugas menyebarkan kampanye positif mengenai indahnnya menghargai perbedaan sesuai esensi Bhineka Tunggal Ika. Keterlibatan aktif unsur siswa ini memperluas jangkauan program pencegahan sehingga tidak lagi bersifat top-down dari guru saja.

Secara keseluruhan, pelaksanaan program kombinasi ini mendapatkan respons yang sangat positif dari seluruh komunitas sekolah menengah pertama di Pulang Pisau yang terlibat. Berdasarkan angket kepuasan mitra yang disebar pada akhir kegiatan, sebesar 94% responden menyatakan bahwa materi yang disampaikan sangat aplikatif dan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Kepala Dinas Pendidikan setempat yang hadir pada penutupan acara memberikan apresiasi tinggi dan berencana menjadikan sekolah mitra ini sebagai proyek percontohan bagi SMP lain di Kabupaten Pulang Pisau. Evaluasi menyeluruh memastikan bahwa instrumen dan sistem yang telah dibangun siap dijalankan secara mandiri oleh mitra.

Pembahasan

Keberhasilan peningkatan pemahaman guru secara signifikan membuktikan bahwa metode kombinasi yang diterapkan dalam pengabdian ini memiliki efektivitas tinggi dalam mengubah paradigma pendidik. Melalui penggabungan antara teori dasar dalam sosialisasi dan praktik langsung pada workshop, guru tidak hanya sekadar menghafal definisi perundungan tetapi juga memahami akar psikologis perilaku tersebut (Sari & Setiawan, 2023). Pendekatan berlapis ini meruntuhkan bias lama guru yang sering menganggap perundungan verbal sebagai hal yang lumrah dalam masa pertumbuhan remaja. Nilai Pancasila, khususnya Sila Kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab), dijadikan instrumen utama untuk menyentuh empati profesional para guru agar berkomitmen melindungi hak-hak emosional setiap siswa di sekolah (Kurniawan & Saputra, 2024).

Penyusunan SOP anti-perundungan yang legal formal menjadi tonggak penting dalam menjamin keberlanjutan program pencegahan di Kabupaten Pulang Pisau. Sebuah kebijakan institusional yang jelas terbukti mampu memberikan rasa aman hukum bagi guru dalam bertindak sekaligus memberikan kepastian keadilan bagi para korban perundungan (Utomo & Dewi, 2024). Pengintegrasian nilai keadilan sosial dalam SOP memastikan bahwa pelaku perundungan tidak sekadar dihukum, melainkan dibina melalui pendekatan restoratif agar menyadari kesalahannya. Dokumen ini menjadi rujukan baku yang meminimalisasi subjektivitas guru dalam mengambil keputusan, sehingga semua siswa diperlakukan setara di depan aturan sekolah.

Implementasi nilai Pancasila dalam program ini menjadi sangat kontekstual ketika disandingkan dengan kearifan lokal Kalimantan Tengah, yaitu filosofi *Huma Betang*. Nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan toleransi beragama yang terkandung dalam *Huma Betang* memperkuat manifestasi Sila Ketiga Pancasila dalam interaksi harian siswa (Lestari & Nugraha, 2023). Guru-guru mitra melaporkan bahwa siswa lebih mudah memahami konsep tidak menyakiti sesama ketika analogi kehidupan harmonis dalam *Huma Betang* diangkat sebagai materi penguatan karakter di kelas. Sinergitas nilai nasional dan lokalitas ini menjadi strategi kebudayaan yang efektif untuk menangkal radikalisme perilaku remaja di Pulau Pisau.

Pendampingan klinis yang dilakukan secara intensif memberikan ruang bagi guru untuk mengatasi fenomena *cyberbullying* yang selama ini luput dari jangkauan pengawasan sekolah. Guru diberikan keterampilan literasi digital khusus untuk mampu memetakan konflik siber yang kerap kali berlanjut pada kekerasan fisik di sekolah (Fadilah & Anwar, 2024). Melalui bimbingan langsung, guru berhasil merumuskan kontrak belajar digital di kelas masing-masing yang disepakati bersama siswa sebagai implementasi nilai musyawarah (Sila ke-4). Penanganan yang komprehensif pada ranah maya dan nyata ini merupakan respons adaptif terhadap perkembangan teknologi yang mendisrupsi pola interaksi sosial remaja saat ini.

Pembentukan Satgas Anti-Perundungan berbasis keterlibatan siswa atau *peer-group intervention* terbukti memotong rantai senioritas buruk yang sering menjadi pemicu perundungan di tingkat SMP. Intervensi yang melibatkan teman sebaya dinilai lebih efektif karena remaja cenderung lebih terbuka dan jujur berkomunikasi dengan sesama usianya daripada dengan figur otoritas seperti guru (Nugroho & Wijaya, 2022). "Duta Pancasila" yang dibentuk berperan aktif meredam desas-desus atau ejekan antar-teman sebelum hal tersebut bereskalasi menjadi kekerasan fisik. Hal ini menciptakan suasana kontrol sosial yang positif di kalangan siswa, di mana tindakan perundungan dianggap sebagai hal yang memalukan dan tidak keren.

Dari perspektif manajemen pendidikan, kegiatan pengabdian ini berhasil mengubah pola penanganan perundungan di sekolah mitra dari yang semula bersifat reaktif-kuratif menjadi preventif-sistemik. Sekolah yang ramah anak hanya dapat terwujud jika seluruh komponen sekolah terlibat aktif dan konsisten dalam melakukan mitigasi risiko sejak dini (Pratama & Utami, 2022). Penurunan angka gesekan antarsiswa selama periode pengabdian mengindikasikan bahwa iklim sekolah mulai bergeser ke arah yang lebih inklusif dan aman. Keberhasilan ini tidak lepas dari adanya komitmen kepemimpinan kepala sekolah yang kuat dalam mengawal implementasi SOP di lapangan.

Faktor geografis Kabupaten Pulau Pisau yang cukup jauh dari pusat ibu kota provinsi tidak menjadi penghalang berkat pemanfaatan teknologi komunikasi selama proses pendampingan jarak jauh. Kombinasi pertemuan tatap muka (*luring*) untuk workshop dan konsultasi daring (*daring*) via aplikasi pesan instan menjaga ritme diskusi tetap terjaga dengan baik (Hidayat & Lestari, 2023). Model pendampingan hibrida ini menghemat biaya logistik tanpa mengurangi kualitas substansi transfer pengetahuan dari tim pengabdian kepada mitra guru. Fleksibilitas waktu ini sangat diapresiasi oleh guru karena mereka tidak perlu meninggalkan jam mengajar utama di sekolah.

Meskipun menunjukkan hasil yang sangat memuaskan, tim pengabdian mencatat beberapa tantangan yang perlu diantisipasi untuk program replikasi di masa mendatang. Salah satu hambatan yang ditemukan adalah masih adanya sebagian kecil orang tua yang defensif ketika anaknya teridentifikasi sebagai pelaku perundungan ringan (Putri & Ramadhan, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa intervensi karakter tidak boleh berhenti di gerbang sekolah, melainkan harus menyentuh ekosistem keluarga di rumah. Kolaborasi tri-pusat pendidikan (sekolah, keluarga, dan masyarakat) harus diperkuat pada fase pengabdian masyarakat berikutnya untuk menciptakan dampak yang lebih holistik.

Secara teoritis, hasil pengabdian ini memperkuat argumen bahwa revitalisasi nilai Pancasila dalam pendidikan nasional tidak boleh sekadar menjadi hafalan kognitif dalam mata pelajaran PKn. Pancasila harus dihidupkan sebagai *living ideology* yang memberi solusi konkret atas permasalahan sosial kontemporer seperti kekerasan di sekolah (Budiman & Gafur, 2022). Ketika nilai-nilai luhur dasar negara diterjemahkan secara taktis ke dalam bentuk SOP dan aktivitas Satgas, siswa dapat merasakan langsung manfaat keadilan dan kedamaian. Pengalaman empiris di Pulang Pisau ini memberikan kontribusi ilmiah berharga bagi model pengembangan kurikulum karakter di Indonesia.

Akhirnya, keberhasilan program pendampingan ini diharapkan mampu memicu efek domino bagi sekolah-sekolah lain di wilayah Kalimantan Tengah. Dukungan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau menjadi modal regulatif yang kuat untuk memperluas skala kebermanfaatan program ini melalui forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) (Prasetyo & Yunus, 2025). Dengan terdokumentasikannya program ini dalam jurnal ilmiah, akademisi lain dapat mengadopsi dan menyempurnakan metodologi pencegahan perundungan berbasis nilai budaya ini. Upaya menciptakan generasi emas terdidik yang berkarakter Pancasila kini memiliki model praktis yang telah teruji secara empiris.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat berupa pendampingan sekolah dalam pengembangan program pencegahan perundungan berbasis nilai Pancasila dari Desember 2025 hingga Mei 2026 di SMP Kabupaten Pulang Pisau telah terlaksana dengan sangat baik dan mencapai target target luaran yang ditetapkan. Pendekatan kombinasi antara sosialisasi, workshop pembuatan produk, dan pendampingan klinis terbukti efektif meningkatkan kompetensi guru dalam memitigasi serta menangani kasus perundungan secara humanis dan sistematis. Terjadi perubahan paradigma guru yang signifikan dari penanganan reaktif menuju tindakan preventif jangka panjang.

Program pengabdian ini berhasil menelurkan dua luaran institusional yang krusial bagi keberlanjutan iklim sekolah yang aman, yaitu Dokumen *Standard Operating Procedure* (SOP) Penanganan Perundungan legal yang berbasis keadilan Pancasila serta pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Anti-Perundungan yang melibatkan kader siswa aktif. Integrasi nilai luhur Pancasila dengan filosofi kearifan lokal masyarakat Kalimantan Tengah (*Huma Betang*) menjadi kunci utama tingginya penerimaan dan efektivitas implementasi program di lingkungan sekolah mitra. Sinergi ini mampu menumbuhkan rasa empati mendalam di kalangan siswa untuk saling menghargai perbedaan.

Rekomendasi utama setelah berakhirnya masa pengabdian ini adalah perlunya komitmen konsisten dari pihak manajemen sekolah mitra untuk mengawal pelaksanaan SOP secara adil dan berkelanjutan di masa depan. Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau diharapkan dapat mengadopsi model pendampingan kombinasi ini untuk direplikasi di seluruh SMP di wilayah tersebut guna menciptakan ekosistem pendidikan yang merdeka dari kekerasan. Kerja sama lanjutan yang melibatkan peran aktif orang tua di rumah juga mendesak untuk diinisiasi demi menjaga keselarasan pembentukan karakter positif anak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas PGRI Palangka Raya atas bantuan pendanaan dan fasilitas penjaminan mutu yang diberikan selama pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini. Apresiasi setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau atas izin operasional serta dukungan regulatif yang diberikan. Terima kasih yang mendalam juga ditujukan kepada Kepala Sekolah, segenap dewan guru, dan siswa SMP mitra di Pulang Pisau atas dedikasi, partisipasi aktif, dan kerja sama yang luar biasa sepanjang Desember 2025 hingga Mei 2026 demi mewujudkan sekolah aman tanpa perundungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiman, A., & Gafur, A. (2022). Revitalisasi nilai Pancasila sebagai *living ideology* dalam menangkal dekadensi moral remaja. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 19(1), 45–54.
- Fadilah, N., & Anwar, C. (2024). Tantangan *cyberbullying* pada remaja SMP dan strategi mitigasi guru bimbingan konseling di era digital. *Jurnal Psikologi Pendidikan*, 11(2), 112–125.
- Fitriani, S., & Kusuma, W. (2026). Monitoring dan evaluasi program pencegahan kekerasan berbasis sekolah ramah anak. *Jurnal Pengabdian Pendidikan FKIP*, 14(1), 12–23.
- Hidayat, R., & Lestari, S. (2023). Analisis kompetensi pedagogis guru di daerah purnapraja Kalimantan: Hambatan dan solusi geografis. *Jurnal Pendidikan Daerah*, 9(3), 201–215.
- Kurniawan, D., & Saputra, H. (2024). Profil Pelajar Pancasila sebagai instrumen preventif perundungan di sekolah menengah. *Jurnal Teori dan Landasan Pendidikan*, 13(1), 89–102.
- Lestari, M., & Nugraha, A. (2023). Membumikan nilai filosofi *Huma Betang* dalam penguatan karakter kebhinekaan siswa. *Jurnal Kebudayaan dan Pendidikan*, 8(2), 145–158.
- Nugroho, B., & Wijaya, S. (2022). Pengaruh tekanan teman sebaya (*peer pressure*) terhadap perilaku agresif siswa usia remaja awal. *Jurnal Psikologi Perkembangan*, 20(4), 310–322.
- Prasetyo, T., & Yunus, M. (2025). Peran perguruan tinggi dalam hilirisasi riset kependidikan melalui program pengabdian masyarakat. *Jurnal Inovasi Pengabdian*, 7(2), 167–180.
- Pratama, A., & Utami, R. (2022). Membangun sekolah ramah anak bebas dari intimidasi: Sebuah studi kasus sistemik. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 16(2), 78–92.

- Putri, E., & Ramadhan, F. (2025). Respons orang tua dan pola asuh terhadap anak pelaku perundungan di lingkungan sekolah. *Jurnal Konseling Keluarga*, 12(1), 34–47.
- Raharjo, M., & Utama, P. (2023). Transformasi kurikulum mikro: Mengintegrasikan nilai moral dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 14(3), 221–235.
- Santoso, I., & Handayani, T. (2022). Evaluasi program anti-perundungan berbasis pendekatan teoritis barat di sekolah-sekolah Indonesia. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 28(2), 105–119.
- Sari, K., & Setiawan, B. (2023). Peningkatan literasi guru mengenai bentuk-bentuk perundungan non-fisik di sekolah menengah pertama. *Jurnal Pedagogi dan Pembelajaran*, 6(1), 56–68.
- Savitri, D., & Rahayu, P. (2021). Dampak psikologis jangka panjang perundungan masa remaja terhadap kesehatan mental di perguruan tinggi. *Jurnal Psikologi Klinis*, 18(3), 244–256.
- Sujatmiko, H., & Wardani, K. (2023). Kemitraan akademisi dan praktisi sekolah dalam pemecahan masalah kekerasan siswa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 5(4), 411–425.
- Utomo, S., & Dewi, R. (2024). Legalitas dokumen SOP sekolah sebagai jaminan kepastian hukum penanganan kasus kekerasan anak. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 10(2), 132–146.
- Wibowo, A., & Astuti, F. (2024). Efektivitas metode kombinasi dalam pelatihan kompetensi profesional pendidik daerah marginal. *Jurnal Diklat Pendidikan*, 15(1), 67–80.